



SALINAN

BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 9 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

Dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah Perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Sigi.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp1.414.255.252.423,00 bertambah sebesar Rp77.662.922.096,00 sehingga menjadi Rp1.491.918.174.519,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp 1.360.925.761.856,00
b. Bertambah	<u>Rp 61.026.581.210,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp1.421.952.343.066,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 1.414.255.252.423,00
b. Bertambah	<u>Rp 77.662.922.096,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp1.491.918.174.519,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 53.329.490.567,00
2) Bertambah	<u>Rp 16.636.340.886,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp69.965.831.453,00

b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	NIHIL
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		RpNIHIL
Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp69.965.831.453,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		RpNIHIL

### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	70.027.149.794,00
2) Bertambah	Rp	16.521.728.420,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp86.548.878.214,00	
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	1.275.007.784.199,00
2) Bertambah	Rp	42.159.122.415,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.317.166.906.614,00	
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp	15.890.827.863,00
2) Bertambah	Rp	2.345.730.375,00
Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp18.236.558.238,00	

### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp	28.355.571.748,00
2) Bertambah	Rp	7.619.433.478,00
Jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp35.975.005.226,00	
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp	2.891.278.046,00
2) (berkurang)	Rp	(306.586.000,00)
Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp2.584.692.046,00	
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan		
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	2.093.639.148,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp3.093.639.148,00	
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah		
1) Semula	Rp	37.780.300.000,00
2) Bertambah	Rp	7.115.241.794,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp44.895.541.794,00	

(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a.	Transfer pemerintah pusat		
	1) Semula	Rp	1.238.755.145.741,00
	2) Bertambah	Rp	<u>21.865.799.390,00</u>
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp1.260.620.945.131,00
b.	Transfer antar daerah		
	1) Semula	Rp	36.252.638.458,00
	2) Bertambah	Rp	<u>20.293.323.025,00</u>
	Jumlah transfer antar daerah setelah Perubahan		Rp56.545.961.483,00
(3)	Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a.	Pendapatan hibah		
	1) Semula	Rp	NIHIL
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
	Jumlah hibah setelah perubahan		RpNIHIL
b.	Dana darurat		
	1) Semula	Rp	NIHIL
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
	Jumlah dana darurat setelah perubahan		RpNIHIL
c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp	15.890.827.863,00
	2) Bertambah	Rp	<u>2.345.730.375,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp18.236.558.238,00

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Belanja operasi		
	1) Semula	Rp	1.010.210.579.670,00
	2) Bertambah	Rp	<u>40.684.912.879,00</u>
	Jumlah belanja operasi setelah perubahan		Rp1.050.895.492.549,00
b.	Belanja modal		
	1) Semula	Rp	179.172.893.173,00
	2) Bertambah	Rp	<u>29.742.606.403,00</u>
	Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp208.915.499.576,00
c.	Belanja tidak terduga		
	1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
	2) Bertambah	Rp	<u>2.249.582.814,00</u>
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp4.249.582.814,00
d.	Belanja transfer		
	1) Semula	Rp	222.871.779.580,00
	2) Bertambah	Rp	<u>4.985.820.000,00</u>
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp227.857.599.580,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	594.529.713.652,00
2) (berkurang)	Rp	<u>(19.228.518.254,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	575.301.195.398,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	341.668.545.940,00
2) Bertambah	Rp	<u>56.163.551.933,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	397.832.097.873,00
c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	NIHIL
d. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp	2.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	2.500.000.000,00
e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	66.426.320.078,00
2) Bertambah	Rp	<u>3.677.879.200,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	70.104.199.278,00
f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	5.086.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>72.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp	5.158.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp	2.782.534.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp	2.782.534.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	25.428.819.471,00
2) Bertambah	Rp	<u>7.819.969.412,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	33.248.788.883,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp	59.637.212.616,00
2) Bertambah	Rp	<u>8.767.577.436,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	68.404.790.052,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	86.478.612.610,00
2) Bertambah	Rp	<u>12.229.290.403,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan		Rp98.707.903.013,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	4.525.714.476,00
2) Bertambah	Rp	<u>874.369.152,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp5.400.083.628,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp	320.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>51.400.000,00</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan		Rp371.400.000,00
g. Belanja modal aset tidak berwujud		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan		RpNIHIL
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp	2.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp	<u>2.249.582.814,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp4.249.582.814,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	3.124.684.980,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp3.124.684.980,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	219.747.094.600,00
2) Bertambah	Rp	<u>4.985.820.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp224.732.914.600,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	53.329.490.567,00
2) Bertambah	Rp	<u>16.636.340.886,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan		Rp69.965.831.453,00
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan		RpNIHIL

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp	53.329.490.567,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>16.636.340.886,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp69.965.831.453,00
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		RpNIHIL
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		RpNIHIL
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		RpNIHIL
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		RpNIHIL
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		RpNIHIL

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		RpNIHIL
b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		RpNIHIL
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		RpNIHIL



d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		RpNIHIL
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		RpNIHIL

### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD Tahun 2021-2026 dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal atau Investasi Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 27 September 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 27 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 49,06/2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH

Pembina Tkt. I

Nip. 19721205 200212 1 007